

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp0,3 T (17,6%)
▼ -55,9% (yoy)

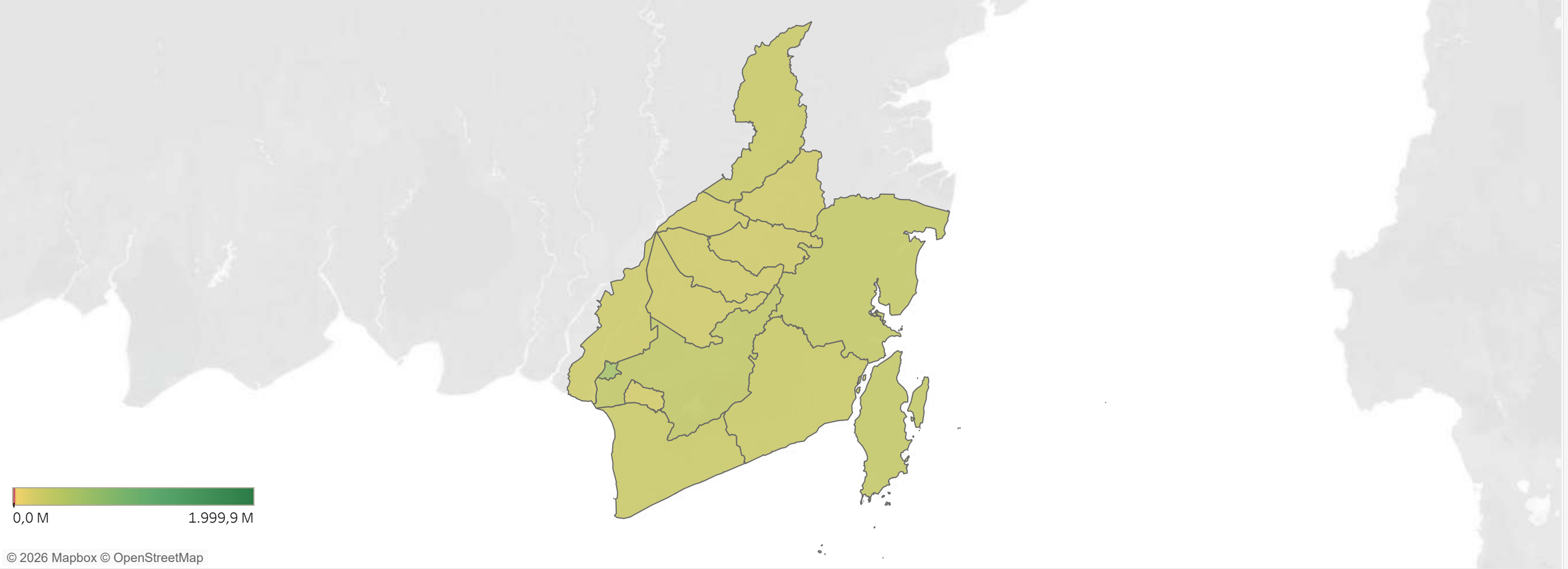
Belanja

Rp4,5 T (16,2%)
▲ 13,2% (yoy)

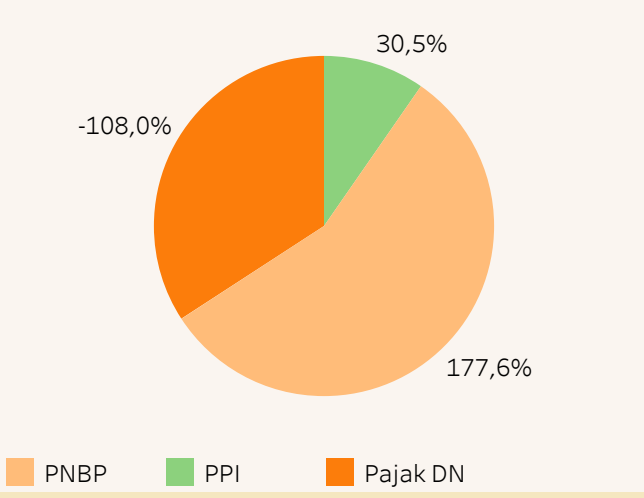
Defisit

Rp-4,3 T (16,1%)
▲ 26,0% (yoy)

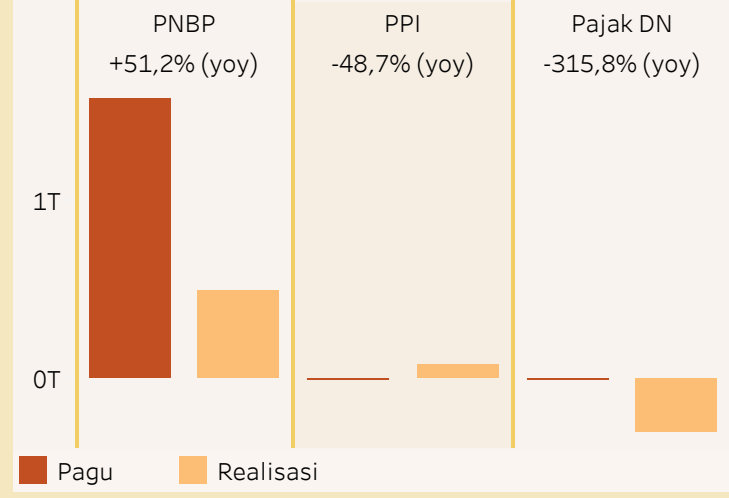
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



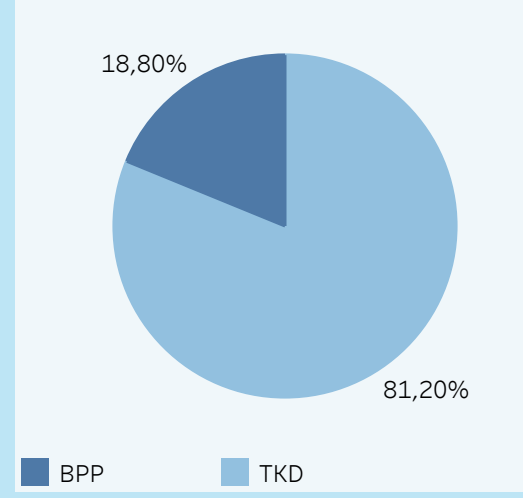
Persentase Komposisi Pendapatan



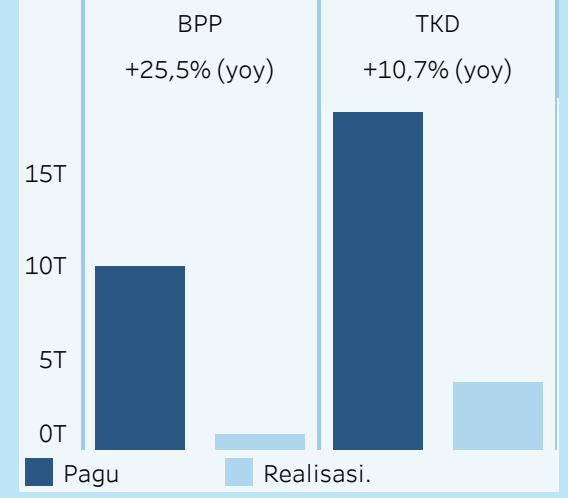
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



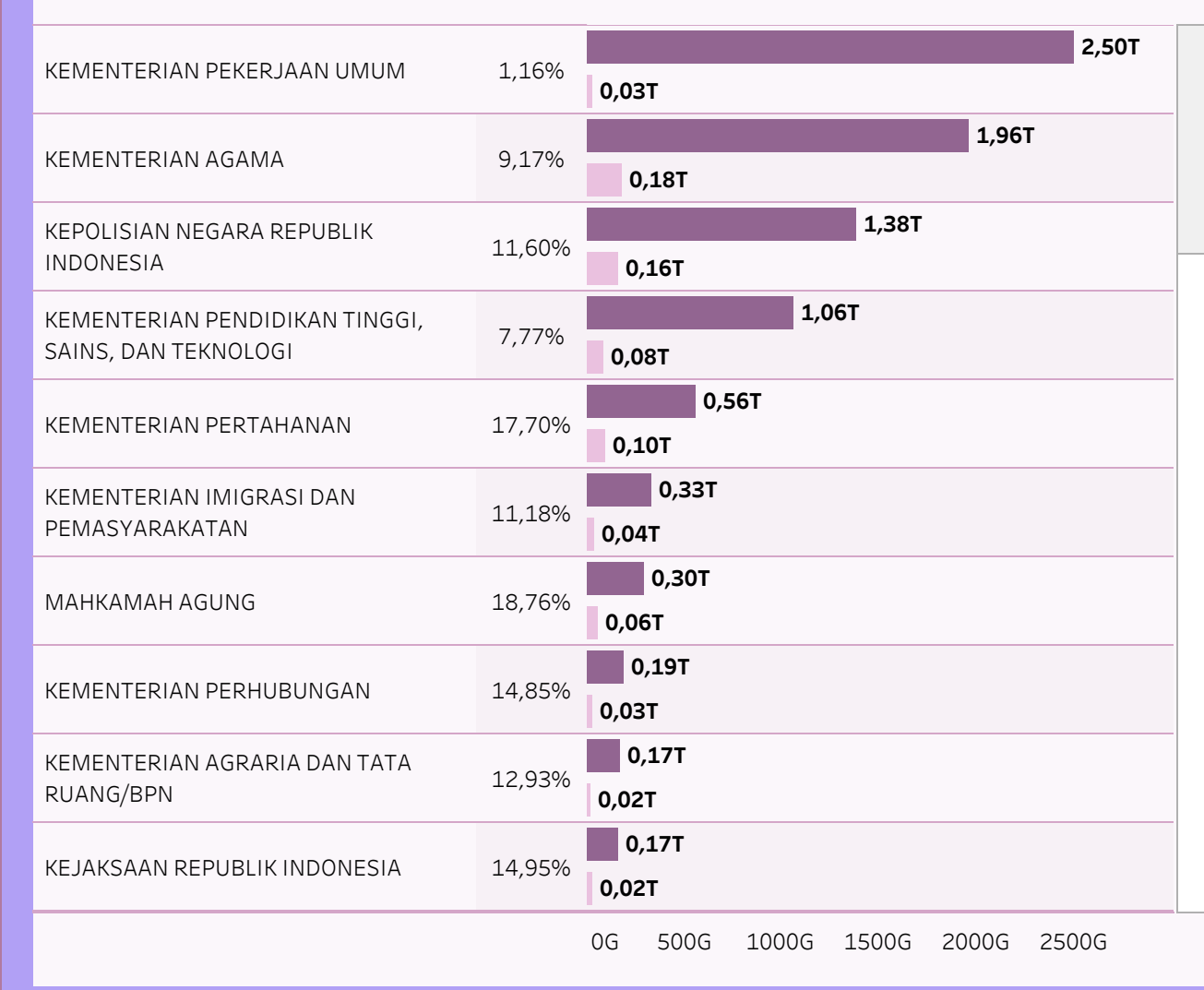
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	0,6T	0,3 T	▼ 55,90%
Grand Total	0,6T	0,3 T	▼ 55,90%

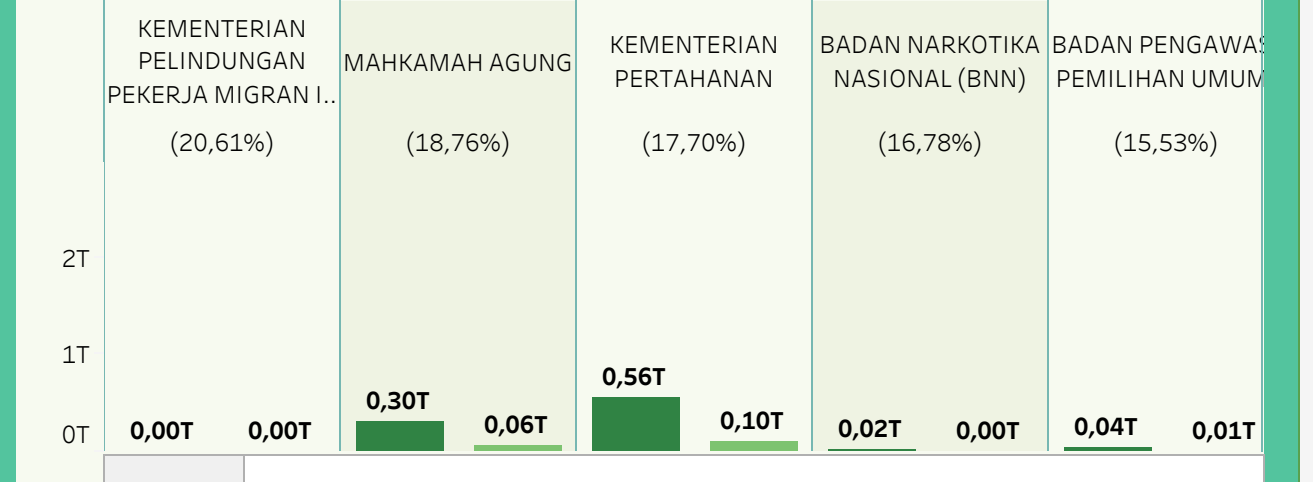
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	4,0T	9,6%	28,1T	4,5 T	16,2%	▲ 13,22%
Grand Total	41,8T	4,0T	9,6%	28,1T	4,5 T	16,2%	▲ 13,22%

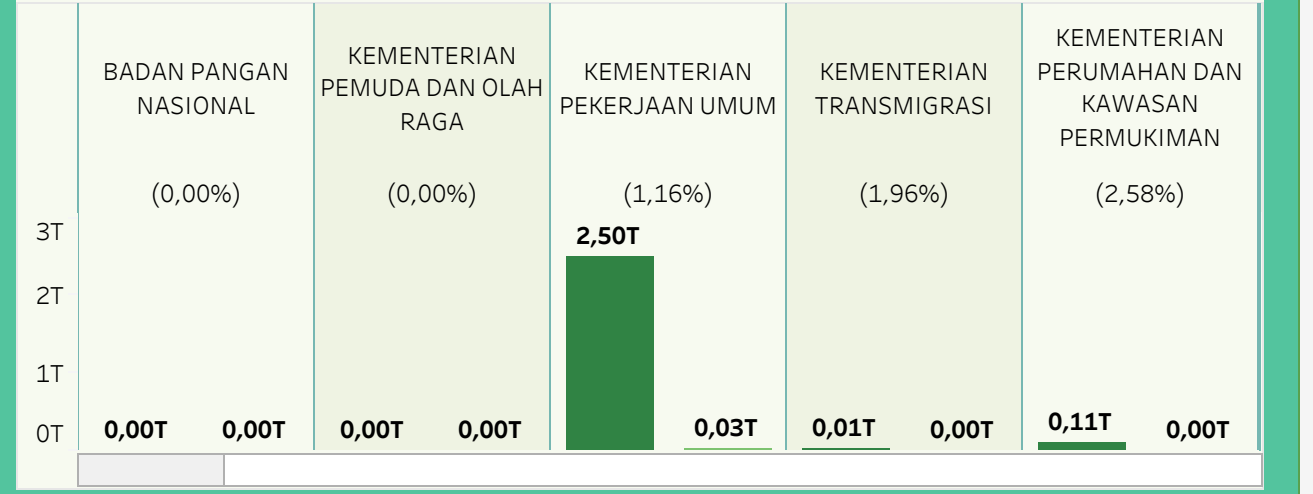
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



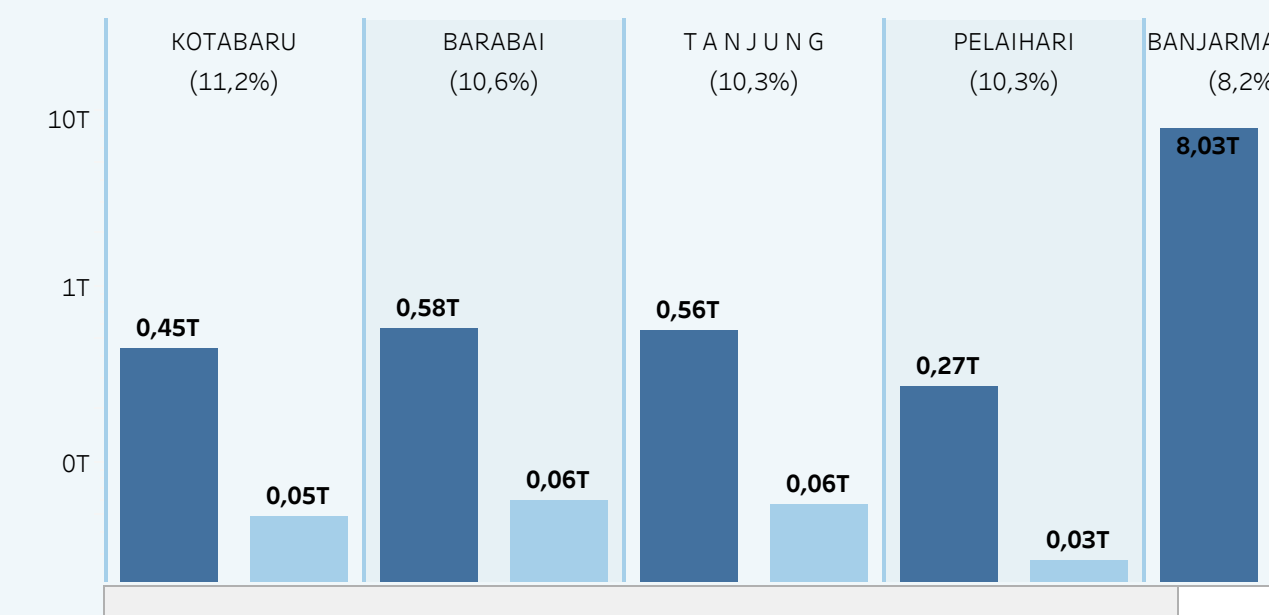
5 KL Persentase Realisasi Terendah



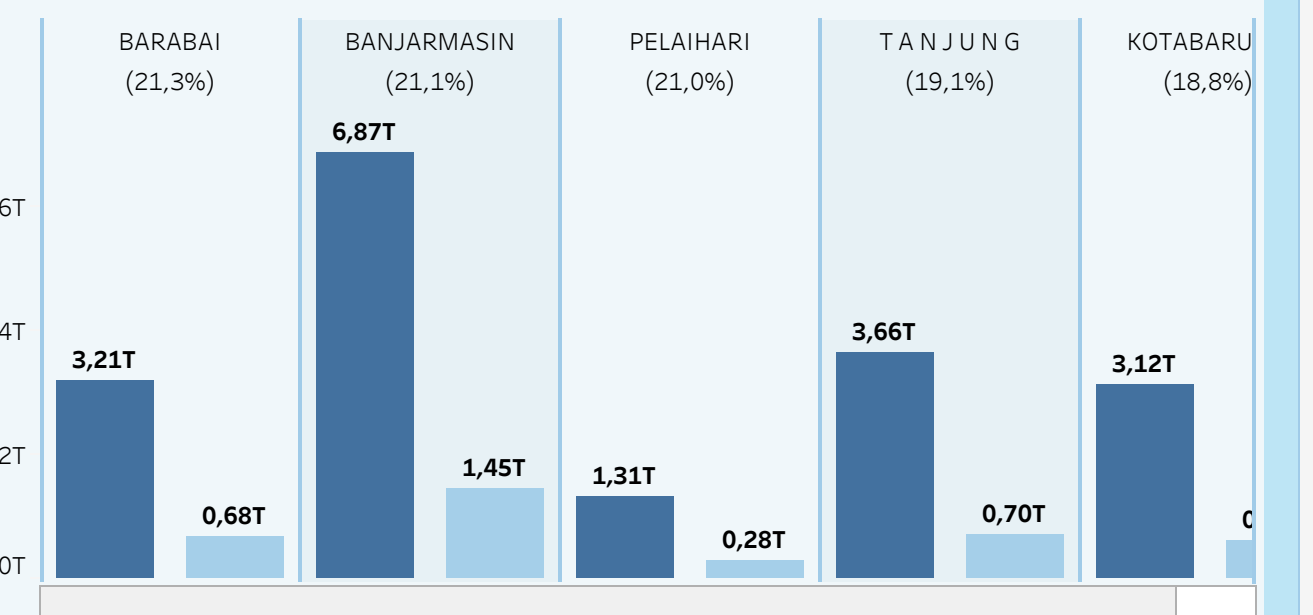
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d. 27 Februari 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp275,58 miliar (0,94%) dari target pendapatan negara sebesar Rp29,44 triliun. Realisasi tersebut terkontraksi sebesar 55,90% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai -1,73% (Rp-297,65 miliar) yang disebabkan oleh pembayaran restitusi pajak lebih besar dari penerimaan, Pajak Perdagangan Internasional mencapai 0,78% (Rp83,93 miliar), serta PNBPN mencapai 31,32% (Rp489,30 miliar). Pendapatan negara didominasi oleh PNBPN (Rp489,30 miliar).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d. 27 Februari 2026

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp4,5 triliun (16,2%) dari pagu Rp28,1 triliun, tumbuh 13,22% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 8,6% (Rp855,14 miliar) dari pagu Rp9,89 triliun, tumbuh 25,5% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 20,3% (Rp3,69 triliun) dari pagu Rp18,17 triliun, tumbuh 10,7% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (81,20%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,50 triliun, dengan realisasi mencapai 1,16% (Rp0,03 triliun). Mahkamah Agung menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 18,76% (Rp0,06 triliun) dari pagu Rp0,30 triliun. Sementara, Kementerian PU menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 1,16% (Rp0,03 triliun) dari pagu Rp2,50 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh BP2MI dengan realisasi 20,61% (Rp0,3 miliar) dari pagu Rp1,22 miliar. Sementara, terdapat 2 K/L yang belum merealisasikan anggaran belanja s.d. 27 Februari 2026 yaitu Badan Pangan Nasional dan Kemenpora.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 19,6% (Rp0,74 triliun) dari pagu Rp3,79 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 14,1% (Rp2,11 triliun) dari pagu Rp14,90 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap obyek pajak berupa *cashback* seperti komisi *affiliate* dan penghargaan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan dan kesalahan pelaporan, serta risiko sanksi perpajakan.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan penguatan literasi perpajakan digital melalui sosialisasi yang intensif kepada pelaku UMKM, *affiliator*, dan pengguna *marketplace*.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Terdapat perubahan kebijakan penganggaran pada satuan kerja lingkup Badan Pertanahan Nasional terkait kegiatan pemetaan foto udara serta pengukuran dan pemetaan tanah yang bersumber dari dana PLN. Jika sebelumnya kegiatan tersebut dialokasikan pada akun 522119 (Belanja Jasa Lainnya), berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Belanja dimaksud seharusnya dialokasikan pada akun 536xxx (Belanja Modal Lainnya). Perubahan pembebanan akun ini berdampak pada penyesuaian rincian output (RO) serta memerlukan proses revisi anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada satker Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Banjar, dan Kotabaru.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Eselon I KL agar mengkoordinasikan seluruh satker untuk pelaksanaan revisi anggaran di DJA sehingga proses revisi anggaran dapat segera dilakukan, dan menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadi pedoman bagi satker dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan dan kegiatan dimaksud.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG tetap seperti periode sebelumnya yaitu 208, jumlah supplier seperti periode sebelumnya yaitu 309, dan penerima manfaat seperti periode sebelumnya yaitu 567.758 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Masih terdapat kendala dan penolakan pada beberapa pondok pesantren di Kalimantan selatan terkait program MBG. Penolakan terjadi karena pondok pesantren bersangkutan sudah memiliki kemandirian dalam menyediakan makanan bagi para santrinya.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Diusulkan skema kolaboratif, misalnya dengan menjadikan pondok pesantren sebagai mitra pelaksana MBG melalui dukungan anggaran, peningkatan standar gizi, atau penguatan kapasitas dapur dan manajemen pangan tanpa menghilangkan kemandirian yang telah terbentuk.

HASIL ANALISIS FLPP

Analisis FLPP

Jumlah unit yang dibangun meningkat dari 852 unit menjadi 1.170, realisasi FLPP meningkat dari 717 unit menjadi 844 unit, jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari 231 lokasi menjadi 251 lokasi, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat semula sebesar Rp94.173.731.250,- menjadi Rp110.873.662.500,-.

Isu dan Rekomendasi FLPP

A | Isu FLPP, meliputi:

Provinsi Kalimantan Selatan saat ini masuk 10 besar nasional untuk capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, tantangan utama masih pada pendataan calon penerima manfaat.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur FLPP, serta instansi terkait seperti dinas kependudukan dan dinas perumahan untuk meminimalkan duplikasi dan ketidaksesuaian data. Pemerintah daerah juga dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan aktif kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar memahami persyaratan dan mekanisme FLPP, sehingga proses pengajuan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Program Prioritas
Minggu ke-8



HASIL ANALISIS GIANT SEA WALL

Analisis Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

Isu dan Rekomendasi Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

HASIL ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Analisis Koperasi Desa Merah Putih

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun Simkopdes (*microsite*) sebanyak 2.012.
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (min. 1 gerai) meningkat semula 950 menjadi 951 gerai.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif meningkat semula 1094 menjadi 1.097.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis meningkat semula 161 menjadi 162.
5. Jumlah permohonan proposal bisnis meningkat semula 481 menjadi 491.

Progres Fase III

1. Jumlah aset (pemetaan lahan) meningkat semula sebanyak 863 menjadi 874.
2. Total Desa/Kelurahan sebanyak 2016

Isu dan Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih

A | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih agar mampu memperkuat struktur perekonomian masyarakat desa. Sinergi kedua lembaga ekonomi tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal serta mendorong kemandirian desa di Kalimantan Selatan.

B | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun *road map* sinergi antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih yang memuat pembagian peran yang jelas berbasis *business core*, dimana BUMDes difokuskan pada pengelolaan potensi dan aset desa (produksi dan jasa), sementara koperasi berperan pada penguatan kelembagaan anggota, pembiayaan, dan distribusi.

HASIL ANALISIS SEKOLAH RAKYAT

Analisis Sekolah Rakyat

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR sd Saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 Unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

Isu dan Rekomendasi Sekolah Rakyat

A | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Target penyelesaian Sekolah Rakyat sebelum tahun ajaran baru Juli 2026 berisiko mengalami keterlambatan penyelesaian pembangunan dan berpotensi menghadapi kendala teknis, administrasi, maupun cuaca.

B | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Diperlukan langkah percepatan yang terstruktur melalui penyusunan *time schedule detail*, pelaksanaan konstruksi secara paralel (*fast tracking*) pada item pekerjaan yang memungkinkan, serta dilakukan monitoring secara berkala.

HASIL ANALISIS REVITALISASI SEKOLAH

Analisis Revitalisasi Sekolah

Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 29 Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum.

Isu dan Rekomendasi Revitalisasi Sekolah

A | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Tahun 2025, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi kabupaten di Kalimantan Selatan dengan jumlah penerima revitalisasi terbanyak dari Kemendikdasmen. Sebanyak 55 satuan pendidikan terdiri dari 8 PAUD, 21 SD dan 26 SMP telah rampung direvitalisasi dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

B | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Perlu strategi optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah diperbarui agar berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan pendukung seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan perangkat pembelajaran, serta penguatan manajemen sekolah agar fasilitas yang telah direvitalisasi tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga efektif dalam mendukung transformasi pendidikan.

HASIL ANALISIS SMA UNGGUL GARUDA

Analisis SMA Unggul Garuda

Target Jumlah Sekolah Garuda:

- Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 sekolah.
- Sekolah Garuda Baru masih belum terdapat *update*.

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda sd saat yang sudah berjalan (unit) :

- Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel).
- Sekolah Garuda Baru masih belum terdapat *update*.

Isu dan Rekomendasi SMA Unggul Garuda

A | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Sekolah perimbangan untuk peserta didik Sekolah Garuda Transformasi (SMAN Banua Kalsel) masih terbatas dari sekolah dari Kabupaten Banjar belum memberikan kesempatan dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

B | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu dilakukan perluasan dan pemerataan program sekolah perimbangan bagi peserta didik Sekolah Garuda Transformasi (SMAN Banua Kalsel), melalui penyusunan kebijakan inklusif berbasis kuota wilayah, penguatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta pemanfaatan platform kolaborasi dan pembelajaran berbagi praktik baik agar seluruh peserta didik di Kalimantan Selatan memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses inovasi, peningkatan mutu, dan dampak transformasi pendidikan yang dihasilkan oleh SMAN Banua Kalsel.

HASIL ANALISIS KETAHANAN PANGAN

Analisis Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2026, data s.d. saat ini telah teralokasi dana sebesar Rp265,05 Miliar.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Pangan

A | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Keterbatasan Sarana Penyimpanan dan Pascapanen di Sentra Produksi. Seiring dengan meningkatnya produksi padi dan jagung belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lumbung pangan dan gudang penyimpanan (storage) yang memadai di wilayah prioritas seperti Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan hasil (losses) dan fluktuasi harga saat panen raya.

B | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mengakselerasi program rehabilitasi dan pembangunan lumbung pangan serta gudang penyimpanan komoditas strategis di sejumlah wilayah sentra produksi.

HASIL ANALISIS KETAHANAN ENERGI

Analisis Ketahanan Energi

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Energi

A | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

B | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.